

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Tuna merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hal ini dikarenakan tuna merupakan jenis ikan ekonomis tinggi sehingga menjadi komoditas penghasil devisa Indonesia nomor dua untuk komoditas perikanan setelah udang. Pada dewasa ini, tuna memiliki permintaan konsumen yang cukup tinggi akibat mulai bergesernya selera konsumen dunia dari *red meat* ke *white meat*. Hal ini terlihat dari permintaan tuna di pasar global seperti Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Letak geografis dan geopolitik Indonesia yang strategis serta keanekaragaman biota lautnya merupakan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain. Maka Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu produsen dan eksportir utama produk perikanan khususnya tuna. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari (*maximum sustainable yield; MSY*) sumber daya ikan laut Indonesia di perairan wilayah laut Indonesia diperkirakan menghasilkan 4,40 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun.

Sebagai jenis ikan yang sangat digemari oleh masyarakat dunia, kebutuhan akan tuna menjadi meningkat pada era milenium ini karena kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah serta mengandung mineral kalsium, fosfor, besi dan sodium, vitamin A (retinol), dan vitamin B (thiamin, riboflavin dan niasin). Dengan ini tuna dijual dengan harga yang mahal. Keadaan ini memicu

suatu negara seperti Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor tunanya. Namun disisi lain, keadaan ini memicu tindak illegal fishing oleh kapal asing yang memanfaatkan potensi sumberdaya tuna Indonesia yang melimpah.

Dalam menganalisis akselerasi ekspor tuna ke negara tujuan utama seperti Jepang dan Amerika, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri menurut Richard Snyder. Politik Luar Negeri adalah perilaku Negara dalam hubungan internasional, dimana dalam pengambilan keputusan (*Decision Making*) dipengaruhi oleh berbagai struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*internal*) dan sistem internasional (*eksternal*) yang harus di pertimbangan oleh Negara. Faktor internal dan eksternal akan membentuk preferensi suatu negara pada pembuatan kebijakan luar negeri, dimana faktor internal akan lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia.

Kebijakan yang berperan dalam membantu meningkatkan ekspor tuna Indonesia ke pasar global seperti Jepang dan Amerika Serikat adalah kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 dan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 69 ayat (1) dan ayat (4).

Kebijakan moratorium dan penenggelaman kapal merupakan salah satu faktor kenaikan ekspor tuna Indonesia pada tahun 2017-2019 yangmana kebijakan tersebut berperan sebagai wadah untuk menghentikan praktek *illegal fishing* oleh kapal asing yang merugikan

Indonesia karena stok tuna yang berkurang. Dimana kebijakan tersebut berdampak baik bagi produktivitas tuna yang presentasenya mengalami kenaikan setiap tahunnya pasca penerapan kebijakan tersebut yang kemudian adanya kenaikan ekspor tuna Indonesia ke negara-negara tujuan utama seperti Jepang dan Amerika Serikat karena jumlah stok tuna di wilayah perairan Indonesia meningkat.

Selain itu Indonesia sebagai negara produsen tuna terbesar di dunia memiliki tujuan untuk mempertahankan maupun meningkatkan ekspor tuna dipasar global. Indonesia ikut berpartisipasi diberbagai organisasi tuna internasional dalam upaya untuk meningkatkan ekspor tuna di pasar global. Tentunya dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan organisasi tuna internasional merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ekspor tuna Indonesia. Organisasi tuna Internasional seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) dan WWF-Indonesia Seafood Savers memiliki rezim yang mengatur sistem perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memiliki peran pengelolaan konservasi sumberdaya perikanan di dunia dengan menerbitkan peraturan (*resolusi and conservation management measure*) yang mewajibkan negara anggotanya agar dapat menjamin jumlah sumberdaya tuna.

Kemudian kebijakan dari negara-negara pengimpor tuna Indonesia juga berperan dalam kenaikan ekspor tuna Indonesia pada tahun 2017-2019 yakni Jepang dan Amerika Serikat. Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia karena tingginya permintaan produk tuna di Jepang yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tuna. Hampir 90% dari permintaan pasar dunia akan tuna segar dan beku dipusatkan di Jepang karena mayoritas masyarakat Jepang suka mengkonsumsi

sushi dan sashimi. Dalam memenuhi kebutuhan tunanya, Jepang melalui kerjasama *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Melalui IJEPA, Jepang memberikan penurunan tarif impor terhadap tuna Indonesia dari 9% menjadi 3,5% dan akan ditinjau pengurangan tarif secara bertahap dalam 3 sampai 15 tahun sesuai dengan perjanjian IJEPA yang telah disepakati.

Selain itu kebijakan dari Amerika Serikat terhadap tuna Indonesia juga berpengaruh terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia pada tahun 2017-2019. Amerika Serikat menerapkan kebijakan US-GSP yang merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk mempermudah kegiatan perdagangan ekspor oleh negara-negara berkembang. Dalam kebijakan US-GSP menerapkan pengurangan tarif bea masuk komoditi tuna Indonesia menjadi 0%. Kebijakan US-GSP memberikan peran yang signifikan terhadap komoditi tuna Indonesia di pasar Amerika Serikat sendiri sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat.